

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG MASALAH**

Istilah Indo-Pasifik menjadi topik perdebatan yang hangat dibicarakan dalam beberapa tahun terakhir karena dinilai memiliki peluang ekonomi sekaligus tantangan keamanan yang besar. Pada 18 Oktober 2017 sekretaris negara Amerika Serikat, Rex Tillerson, menyebutkan konsep “Indo-Pasifik Bebas dan Terbuka”, yang diadopsi oleh Presiden Donald Trump pada November 2017 saat berkunjung ke Asia. Trump menggunakan istilah "Indo-Pasifik" daripada "Asia-Pasifik" digunakan dalam pidatonya. Kawasan perairan ini meliputi Samudera Hindia, Samudera Pasifik, Benua Asia Daratan, Benua Australia, Asia Tenggara, serta negara-negara maju seperti Cina, Jepang, Korea Selatan, India, Australia, Amerika Serikat dan Kanada (Montratama, 2016). Selama Perang Dingin, wilayah Indo-Pasifik hanyalah wilayah terjadinya *proxy war*. Namun pada abad ke 21, wilayah Indo-Pasifik menjadi wilayah yang penting.

Saat ini Indo-Pasifik merupakan kawasan dengan pertumbuhan ekonomi paling dinamis di dunia dimana negara peserta *East Asia Summit* (EAS) merupakan bagian dari kawasan tersebut. Jika digabungkan, ukuran ekonomi negara-negara peserta EAS mencapai lebih dari USD 65,8 triliun. Diperkirakan Dalam tiga tahun ke depan akan mencapai kurang lebih USD 95,6 triliun (Perkenalkan Konsep Indo-Pasifik, Indonesia Set the Tone di East Asia Summit, 2018). Kesepuluh negara ASEAN yang letak lokasinya strategis karena berada di tengah-tengah kawasan Indo-Pasifik kini tengah memproses perancangan strategi agenda geopolitik. Konsep ini memiliki tujuan untuk mempromosikan penyelesaian suatu permasalahan atau sengketa dengan cara damai dan saling mempercayai satu sama lain dengan tidak menggunakan kekuatan militer sebagai

bentuk penyelesaian. Oleh karena itu diharapkan asosiasi negara-negara Asia Tenggara bekerja sama menjadi penggerak konsep tersebut.

Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Retno Marsudi dalam pertemuan tingkat Menteri ke-8 *East Asia Summit* yang diselenggarakan di *Singapore Expo* pada tanggal 4 Agustus 2018 lalu mengatakan bahwa konsep Indo-Pasifik ini bukan untuk menciptakan mekanisme yang baru dan menggantikan yang sudah ada, melainkan untuk meningkatkan kerja sama dengan mekanisme yang sudah ada.

Kendati demikian, isu keamanan maritim menjadi isu yang tak terelakkan mengingat kawasan Indo-Pasifik merupakan kawasan perairan yang banyak dilalui oleh kargo-kargo. Sebagian besar kargo yang melewati jalur perhubungan laut dunia atau *Sea Lanes of Communications* di Indo-Pasifik adalah sumber daya energi yang berharga dalam artian belum memiliki penggantinya seperti minyak, gas, dan batu bara. Masalah yang dihadapi kawasan Indo-Pasifik di abad 21 ini adalah isu-isu keamanan yang mengganggu hubungan antara negara-negara sekawasan dan tidak dapat dihindari. Isu-isu keamanan yang saat ini menarik perhatian dunia adalah masalah di semenanjung Korea pasca perang dingin, sengketa Laut Cina Selatan, ketegangan bilateral antar negara-negara di Asia Timur, sengketa perbatasan antar beberapa negara di Asia Tenggara, gerakan terorisme, perdagangan narkoba, pencucian uang serta masalah keamanan manusia (Purnama, 2017). Tantangan paling utama dari konsep Indo-Pasifik adalah keberhasilan terwujudnya konsep ini bergantung pada sikap negara-negara yang terlibat. Langkah awal yang sudah dilakukan adalah pengusulan penanda-tanganan perjanjian oleh mantan menteri luar negeri Indonesia, Marty Natalegawa pada bulan Mei 2013 (Ram, 2015). Dalam pidatonya di EAS, Marty mengatakan bahwa negara-negara di kawasan Samudra Hindia dan Samudra Pasifik adalah penting sementara Indonesia adalah negara yang menghubungkan kedua samudera ini. ASEAN, termasuk Indonesia, hanya bisa aman dan stabil jika ada

perdamaian dan kemakmuran di kawasan Indo-Pasifik. Marty mengingatkan para peserta bahwa pada tahun 2011, prinsip-prinsip deklarasi EAS untuk hubungan yang saling menguntungkan diadopsi oleh negara-negara kawasan Indo-Pasifik; dia akhirnya mengusulkan agar itu diubah menjadi “Perjanjian Persahabatan dan Kerjasama Indo-Pasifik” untuk digunakan sebagai mekanisme untuk mengelola urusan keamanan regional. Namun tidak ada satu negara pun yang menunjukkan ketertarikan mereka terhadap perjanjian ini (Suryadinata, 2018).

Kejadian yang tidak kalah pentingnya yang terjadi di kawasan Indo-Pasifik diantaranya adalah sengketa perebutan wilayah di Laut Cina Selatan dimana sengketa ini secara langsung melibatkan negara-negara yang berbatasan dengan wilayah tersebut yakni Taiwan, Cina, Filipina, Brunei, Vietnam dan Malaysia. Terjadinya sengketa ini bermula dari klaim Cina atas Laut Cina Selatan yang melibatkan lima negara lain yang merasa teritorialnya diklaim oleh Cina. Laut Cina Selatan merupakan aset penting karena wilayah tersebut menyimpan banyak kekayaan berupa ikan, minyak bumi serta merupakan lokasi strategis karena sering dilalui oleh kapal-kapal pedagang melalui laut.

Dalam konflik Laut Cina Selatan, selain ketegangan yang terjadi akibat tumpang tindihnya klaim antar negara bersengketa yang belum bisa dihentikan hingga kini, muncul masalah lain yang sama pentingnya karena permasalahan ini menyangkut hubungan antara dua negara anggota ASEAN yaitu Vietnam dan Filipina dengan Cina. Filipina beberapa kali telah memberikan beragam laporan mengenai pelanggaran yang dilakukan oleh kapal-kapal Cina yang melewati perairan yang disengketakan, bahkan terjadi beberapa insiden antara kapal patroli Cina dengan kapal-kapal nelayan Filipina.

Selanjutnya ada pula tuduhan untuk Cina karena mengintimidasi kapal - kapal eksplorasi minyak Filipina. Sementara Vietnam telah melakukan setidaknya empat kali

pertemuan bilateral dengan Cina sejak awal 2011 dalam rangka membicarakan tentang Laut Cina Selatan. Namun perilaku Cina seperti semakin meningkatkan jumlah dan kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan kapal - kapal Cina di perairan Vietnam akhirnya membuat segala hasil pertemuan bilateral antar keduanya menjadi percuma. Insiden seperti pemotongan kawat-kawat di tempat eksplorasi minyak Vietnam yang dilakukan Cina juga pada akhirnya semakin memperkeruh suasana dan membuat inisiatif baru bagi Vietnam untuk selalu meningkatkan kapabilitas militernya di Laut Cina Selatan (Sudira, 2014).

Wilayah lain yang terkena sengketa adalah Laut Cina Timur dimana Jepang dan Cina sama-sama melakukan klaim atas pulau-pulau tak berpenghuni yang tersebar di sekitarnya (Kepulauan Senkaku/Diaoyu). Akibatnya, kedua negara ini sama-sama meningkatkan kekuatan militer mereka demi melindungi dan mencapai kepentingan keamanan nasionalnya di wilayah yang bersengketa tersebut. Kasus perebutan kepulauan Senkaku antara Jepang dan Cina kembali memanas sejak tahun 2010 yang disebabkan oleh sebuah insiden dimana dua kapal pengawasan maritim milik Jepang tertabrak di sekitar perairan kepulauan Senkaku oleh sebuah kapal pukat milik Cina. Akibat insiden ini, Jepang dan Cina kembali mengangkat permasalahan kedaulatan kepulauan Senkaku yang belum terselesaikan sejak tahun 1970. Cina mengajukan tuntutan nya atas kepulauan Senkaku dengan beberapa bukti historis, namun Jepang menganggap bahwa kasus perebutan Kepulauan Senkaku tidak pernah ada. Jepang menyatakan bahwa berdasarkan Perjanjian San Fransisco 1951 Artikel 2 dan 3, Jepang memiliki hak kedaulatan atas Kepulauan Senkaku yang diberikan oleh Amerika. Pernyataan Jepang tersebut dibantah oleh Cina dengan berbagai alasan (Febrina, 2014)

Masalah lain yang menonjol di Indo-Pasifik perlombaan akses dan kendali terhadap sumber daya alam yang tersebar di kawasan perairan terlebih minyak bumi dan gas alam. Keduanya merupakan sumber energi paling utama di abad

21 karena belum adanya sumber daya alternatif yang bisa menggantikan dua sumber daya alam tersebut.

Berkembangnya isu-isu keamanan mengakibatkan munculnya kebutuhan strategi keamanan yang baru untuk melengkapi yang sudah ada saat ini yang mungkin saja perlu dirombak ulang sesuai dengan perkembangan lingkungan yang senantiasa berubah dan memunculkan peluang serta tantangan baru. Strategi yang selama ini dipakai berupa dialog-dialog dalam beberapa kerjasama keamanan seperti dialog-dialog yang dilakukan dalam *ASEAN Regional Forum* (ARF) dianggap sudah tidak memadai untuk menjawab tantangan keamanan yang tengah dihadapi. Oleh karena itu butuh adanya keseimbangan di kawasan Indo-Pasifik sehingga tidak ada kekuasaan yang mendominasi. Indonesia sebagai salah satu negara anggota ASEAN diharapkan dapat berperan lebih dengan menjadi penengah permasalahan seperti persengketaan wilayah (Purnama, 2017).

Pada dekade 90an, terdapat beberapa perkembangan dimana perkembangan tersebut mengubah desain arsitektur keamanan di kawasan Indo-Pasifik. Salah satunya yang penting dan dianggap sebagai sebuah sumber utama perubahan tersebut adalah pembentukan ARF pada tahun 1993. ARF merupakan puncak dari timbulnya ide-ide dan inisiatif baru untuk pembentukan forum multilateral untuk keamanan kawasan. ARF merupakan satu-satunya forum multilateral yang membahas masalah keamanan di Indo-Pasifik. ARF dibentuk pada pertemuan ke- 26 dari *ASEAN Ministerial Meeting and Post Ministerial Conference* yang diadakan di Singapura pada tanggal 23 – 25 Juli 1993. Kemudian pada 25 Juli 1994 diadakan pertemuan perdana ARF di Bangkok (Purnama, 2017)

Tujuan dari pembentukan ARF seperti yang dirancang pada *ARF Chairman's Statement* yang pertama pada 1994 adalah untuk mendorong dialog yang konstruktif serta melakukan konsultasi tentang isu-isu politik dan keamanan yang menjadi kepentingan dan perhatian bersama. Selain itu

juga bertujuan untuk membuat kontribusi terhadap upaya-upaya menuju pembangunan kepercayaan dan diplomasi yang bersifat preventif di wilayah Indo-Pasifik. Dalam *ASEAN Ministerial Meeting* yang ke-27 pada 1994, dinyatakan juga bahwa ARF bisa menjadi forum konsultatif yang efektif di kawasan Indo-Pasifik dalam mempromosikan dialog terbuka untuk menjalin kerjasama di bidang politik dan keamanan di kawasan regional tersebut. Untuk mewujudkannya, ASEAN harus bekerjasama dengan mitra ARF untuk membawa pola hubungan di kawasan Asia Pasifik yang lebih bisa diprediksi dan konstruktif. Saat ini negara-negara atau organisasi yang berpartisipasi dalam ARF ada sebanyak 27 partisipan (Purnama, 2017)

Pencapaian ARF antara lain adalah ARF berhasil melibatkan negara-negara besar seperti Amerika Serikat, Cina, Jepang dan Rusia untuk menjadi partisipan dalam ARF. Hal ini menguntungkan karena dengan bergabungnya negara besar tersebut, memungkinkan ARF bersama dengan negara-negara lain mengadakan dialog dan menemukan solusi atas permasalahan politik dan keamanan yang terjadi di kawasan Indo-Pasifik sehingga dapat menghindari terjadinya pengerahan kekuatan ataupun perang secara terbuka yang disebabkan oleh permasalahan yang tidak dapat terselesaikan. Pencapaian lainnya seperti yang dikutip dari Beckman oleh Aisarieva (Purnama, 2017) adalah ARF sampai tahun 2009 telah berhasil membuat sengketa Laut Cina Selatan tidak sampai menimbulkan konflik terbuka antar negara-negara yang terlibat sengketa tersebut dan salah satu alasan utamanya adalah karena ARF berhasil mengajak Cina untuk menyetujui berdialog dengan ASEAN dalam menciptakan pencegahan konflik, walaupun ARF masih harus melanjutkannya dari pencegahan konflik menjadi kerjasama yang berarti dalam menyelesaikan sengketa tersebut. ARF masih terbatas dalam menyelesaikan konflik yang ada di Indo-Pasifik. Oleh karena itu, perlu adanya inisiatif untuk pembentukan mekanisme kerjasama keamanan yang bisa menyelesaikan permasalahan yang ada.

Konsep Indo-Pasifik sederhananya adalah menyambungkan antara dua samudra dimana titik temunya berada di Indonesia. Hal ini membuat Indonesia harus menjadi peran utama dalam kerja sama geo-politik ini. Bagi Indonesia, kondisi ini dapat mempengaruhi peran sentral dan relevansi ASEAN sebagai kawasan yang menjadi poros Samudera Hindia dan Samudera Pasifik. Indonesia menilai bahwasannya penting bagi ASEAN untuk terus mempertahankan peran sentralnya dan menjadikan Indo-Pasifik sebagai kawasan yang terbuka, transparan, inklusif dan menghormati hukum internasional serta kooperatif dengan menggunakan mekanisme EAS sebagai platform utama. Untuk itu saat ini Indonesia tengah mengembangkan sebuah wawasan mengenai Indo-Pasifik dengan prinsip-prinsip tersebut. Sebagai langkah awal implementasi wawasan ini, Indonesia bersama Selandia Baru menyusun *EAS Leaders's Statement on Combatting Marine Plastic Debris* yang disahkan pada KTT EAS bulan November di Singapura dan meminta negara-negara EAS mendukung pelaksanaan “*Our Ocean Conference*” pada 29 sampai 30 Oktober 2018 di Bali.

Mantan Presiden RI ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono, dalam pidato kenegaraan pada tanggal 16 Agustus 2013 menyebutkan bahwa Indonesia menginginkan adanya keseimbangan di kawasan Indo-Pasifik sehingga tidak ada kekuasaan yang mendominasi di kawasan tersebut. Keseimbangan itu dibangun dengan meningkatkan kerjasama dan membangun pola hubungan kerjasama dan kemitraan sehingga kompetisi dan konfrontasi dapat dihindari. Untuk mewujudkannya, Indonesia terus mendorong agar diwujudkannya gagasan *Indo-Pacific Treaty for Friendship and Cooperation* yang bertujuan untuk meningkatkan rasa saling percaya dan mengesampingkan penggunaan kekerasan dalam penyelesaian sengketa. *Indo-Pacific Treaty* ini dianggap sejalan dengan *Treaty of Amity and Cooperation* (TAC) yang dimiliki oleh ASEAN dimana perjanjian ini bertujuan untuk

mempromosikan penyelesaian sengketa secara damai (Purnama, 2017)

Lebih lanjut, ide itu adalah perluasan dari TAC yang berkomitmen untuk tidak menggunakan kekuatan dalam penyelesaian sengketa. Indonesia mengharapkan ekosistem yang damai, stabil dan sejahtera harus dapat terbentuk di lingkaran Samudera Hindia dan Samudera Pasifik di Lingkaran Indo-Pasifik. Hal ini disampaikan Presiden Joko Widodo dalam KTT ASEAN - India di Rasthrapati Bhawan, India. Pada kesempatan itu, Jokowi mengungkapkan konsep kawasan Indo-Pasifik. Jokowi juga mengatakan konsep Indo-Pasifik dapat dikembangkan berdasarkan Traktat Kerja Sama dan Persahabatan ASEAN dimana semua negara penting di kawasan telah menjadi para pihak dari perjanjian (Indonesia Diharapkan Menjadi Penggerak Indo-Pasifik, 2018)

Jokowi menyampaikan bahwa pengembangan konsep Indo-Pasifik akan baik jika dilakukan melalui penguatan kerja sama bilateral maupun plurilateral seperti ASEAN-India, penguatan mekanisme kawasan seperti Asosiasi Kerja Sama Lingkaran Samudra Hindia (IORA) di Samudra Hindia, mekanisme pimpinan ASEAN khususnya Konferensi Tingkat Tinggi Asia Timur (EAS) Samudera Pasifik, pengaitan dan pengintegrasian mekanisme kerja sama Samudera Hindia dan Pasifik. Presiden menggarisbawahi bahwa kerja sama maritim adalah kunci dalam pengembangan arsitektur kawasan Indo-Pasifik dan Indonesia memiliki komitmen kuat dalam meningkatkan kerja sama maritim baik melalui IORA maupun EAS. Indonesia mengharapkan kawasan Indo-Pasifik akan menjadi salah satu sumber utama pertumbuhan ekonomi, pusat perdagangan dan industri dunia. Konsep kawasan Indo-Pasifik juga disampaikan oleh Menteri Luar Negeri RI Retno Lestari Priansari Marsudi dalam Pidato Pers Tahunan di Kementerian Luar Negeri awal Januari lalu, Asosiasi Negara-negara Asia Tenggara (ASEAN) diharapkan menjadi inti untuk mengerjakan strategi geo politik Indo-Pasifik, dan Indonesia menjadi salah satu penggeraknya. Menurut Kepala Analisis



Kebijakan dan Pengembangan Kementerian Luar Negeri, Siswo Purwono, Indonesia harus turut aktif mengelola dalam konteks geo-politik yang baru tersebut.

Sejak 2014, Presiden Joko Widodo mengusulkan Indonesia sebagai pusat kegiatan kelautan dan ekonomi di Indo-Pasifik karena posisi geo-strategisnya yang menguntungkan dalam perdagangan maritim global. Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang memiliki potensi untuk menjadi Poros Maritim Dunia. Tujuan dari Poros Maritim Dunia tersebut adalah menjadikan Indonesia sebagai negara maritim yang besar, kuat, dan makmur melalui pengembalian identitas Indonesia sebagai bangsa maritim, pengamanan kepentingan dan keamanan maritim, memberdayakan potensi maritim untuk mewujudkan pemerataan ekonomi Indonesia.

Untuk menuju negara Poros Maritim Dunia akan meliputi pembangunan proses maritim dari aspek infrastruktur, politik, sosial-budaya, hukum, keamanan dan ekonomi, penegakkan kedaulatan wilayah laut NKRI, revitalisasi sektor-sektor ekonomi kelautan, penguatan dan pengembangan konektivitas maritim, rehabilitasi kerusakan lingkungan dan konservasi biodiversity, serta peningkatan kualitas dan kuantitas SDM kelautan. Program-program tersebut merupakan program-program utama dalam upaya mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia.

Presiden Joko Widodo menyebutkan lima pilar utama dalam mewujudkan cita-cita Indonesia sebagai poros maritim dunia yaitu; 1) Pembangunan kembali budaya maritim Indonesia, 2) Berkomitmen dalam menjaga dan mengelola sumber daya laut dengan fokus dalam membangun kedaulatan pangan laut melalui pengembangan industri perikanan dengan menempatkan nelayan sebagai pilar utama, 3) Komitmen untuk mendorong pengembangan infrastruktur dan konektivitas maritim dengan membangun tol laut, pelabuhan laut, logistik, industri perkapalan, serta pariwisata maritim, 4) Diplomasi maritim yang mengajak semua mitra Indonesia untuk bekerja

sama pada bidang kelautan, 5) Membangun kekuatan pertahanan maritim.

Dalam dokumen Kebijakan Kelautan Indonesia 2017, lima pilar awal telah ditegaskan kembali dan diperluas untuk mencakup; 1) Pengembangan sumber daya manusia dan kelautan, 2) Keamanan maritim, penegakan hukum, dan keselamatan di laut, 3) Tata kelola dan lembaga kelautan, 4) Pengembangan ekonomi maritim, 5) Manajemen ruang laut dan perlindungan laut, 6) Budaya maritim, 7) Diplomasi maritim. Enam prinsip tambahan yang menjadi dasar Kebijakan Kelautan meliputi; 1) Wawasan Nusantara (*Archipelagic Outlook*), 2) Pembangunan berkelanjutan, 3) *Blue Economy*, 4) Manajemen terintegrasi dan transparan, 5) Partisipasi, 6) Persamaan dan pemerataan (Agastia & Perwita, Building Maritime Domain Awareness as an Essential Element of The Global Maritime Fulcrum: Challenges and Prospects for Indonesia's Maritime Security, 2018).

Cita-cita serta agenda pemerintahan Joko Widodo - Jusuf Kalla menjadi fokus Indonesia di abad ke-21. Indonesia akan menjadi Poros Maritim Dunia, kekuatan yang mengarungi dua samudera sebagai bangsa bahari yang sejahtera dan berwibawa. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus mendorong pertumbuhan sektor kelautan dan perikanan dengan berbagai kebijakan.

Kebijakan KKP tersebut diterjemahkan ke dalam misi tiga pilar yakni kedaulatan, keberlanjutan, dan kesejahteraan, yaitu dipaparkan lebih jelas sebagai berikut; 1) Kedaulatan. Yang memiliki maksud mandiri dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya kelautan dan perikanan dengan cara melakukan penegakan hukum di laut demi mewujudkan kedaulatan secara ekonomi, yang dilakukan melalui pengawasan pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (SDKP) dan sistem perkarantina ikan, pengendalian mutu, keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan, 2) Keberlanjutan. Yaitu mengadopsi konsep *blue economy* dalam

mengelola dan melindungi sumber daya kelautan dan perikanan serta bertanggung jawab dengan prinsip ramah lingkungan sebagai upaya peningkatan produktivitas yang dilakukan melalui pengelolaan ruang laut; pengelolaan keanekaragaman hayati laut; keberlanjutan sumber daya dan usaha perikanan tangkap dan budidaya; dan penguatan daya saing produk hasil kelautan dan perikanan, 3) Kesejahteraan. Mengelola sumber daya kelautan dan perikanan demi tercapainya kemakmuran rakyat, yang dilakukan melalui pengembangan kapasitas SDM dan pemberdayaan masyarakat; dan pengembangan inovasi iptek kelautan dan perikanan (Menuju Poros Maritim Dunia, 2016).

Dalam rangka memperkuat jati diri sebagai negara maritim telah dilakukan pemberantasan *illegal, unreported, and unregulated* (IUU) *fishing* serta melakukan pengembangan ekonomi maritim dan kelautan. Pemberantasan IUU *fishing* telah menjadi prioritas utama pemerintah dalam melindungi sumber daya kelautan dan perikanan. Keberhasilan penanganan pencegahan dan pemberantasan illegal fishing dikarenakan telah berjalannya pelaksanaan pengawasan terhadap pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan. Indonesia memiliki bentang alam yang luas dan sumber daya alam yang luar biasa, dari berbagai sektor seperti pertanian, pangan, energi, dan kemaritiman yang bisa dimanfaatkan. Sektor Kemaritiman pengelolaan dan pemanfaatannya harus dilaksanakan secara bertanggung jawab, guna menjaga kedaulatan, keberlanjutan dan kesejahteraan NKRI.

Jusuf Kalla dalam pembukaan Dialog Tingkat Tinggi Kerja Sama Indo-Pasifik di Jakarta pada tanggal 20 Maret 2019 kemarin tak menampik bahwa laut dari kawasan ini juga menghadirkan berbagai tantangan dengan adanya kejahatan yang dapat terjadi kapanpun seperti penyelundupan, perdagangan narkoba, dan perdagangan manusia. Oleh karena itu perlu adanya kerja sama kemaritiman demi terwujudnya konsep kerja sama maritim Indo-Pasifik ini.

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, penelitian ini memiliki rumusan masalah, yaitu: Apa faktor internal dan eksternal yang mendorong Indonesia mengajukan *Indo-Pacific Treaty* sebagai perluasan kerja sama Indonesia di bidang maritim?

## **C. KERANGKA PEMIKIRAN**

### **1. Perubahan Politik Luar Negeri**

Sebagaimana dikatakan oleh Chris Brown dalam bukunya *Understanding International Relations* (Wuryandari, 2016), politik luar negeri sejatinya merupakan cara memperjuangkan kepentingan nasional terhadap dunia luar. Politik luar negeri berkaitan erat dengan kepentingan nasional suatu negara. Peneliti menggunakan konsep perubahan politik luar negeri karena politik luar negeri Indonesia senantiasa perlu memperhitungkan dinamika kondisi internal dan eksternalnya. Konsep perubahan mengacu pada fenomena kebijakan luar negeri yang mengalami perubahan mulai dari pergeseran yang lebih sederhana ke strukturalisasi ulang kebijakan luar negeri utama. Singkatnya, perubahan kebijakan luar negeri cenderung mencerminkan perubahan yang terjadi dalam struktur, kepercayaan, dan politik masyarakat dan negara dalam konteks sistemik atau internasional yang dinamis. Periode ketidakstabilan dan transisi politik dapat menghasilkan perubahan seperti itu, yang dihasilkan dari sifat dan waktu terjadinya peristiwa dan krisis dalam memicu perubahan (Yani, 2009).

Dalam memeriksa kisaran kemungkinan pola kebijakan luar negeri yang dihasilkan dari masa transisi, terdapat empat hasil yang kemungkinan akan terjadi:

1. Intensifikasi: Tidak ada atau sedikit perubahan. Ruang lingkup, tujuan, dan strategi kebijakan luar negeri diperkuat.
2. Penyempitan: Perubahan kecil dalam ruang lingkup, tujuan, dan strategi kebijakan luar negeri.
3. Reformasi: Perubahan moderat dalam ruang lingkup, tujuan, dan strategi kebijakan luar negeri
4. Restrukturisasi: Perubahan besar dalam ruang lingkup, tujuan, dan strategi kebijakan luar negeri

Indonesia tetap menjadi bagian penting dalam kerja sama internasional untuk mengatasi berbagai masalah global, namun pemerintah juga harus sadar bahwa hubungan internasional tidak bisa terpisahkan dari kebutuhan-kebutuhan dalam negeri. Politik internasional yang semakin kompleks dan berubah-ubah seiring dengan berjalannya waktu ini tentu memunculkan peluang sekaligus tantangan yang harus dihadapi.

## **2. Determinan Politik Luar Negeri**

Determinan politik luar negeri, menurut Howard Lentner (dalam Delanova, 2017) terbagi ke dalam dua kelompok. Pertama, determinan luar negeri/internasional, hal ini merujuk pada sistem internasional dan situasi pada jangka waktu tertentu. Sistem internasional (bi-polar, multi-polar, uni-polar) merupakan pola interaksi di antara negara-negara yang terbentuk sebagai akibat struktur interaksi di antara pelaku - pelaku yang paling kuat (*most powerful actors/dominant actors*).

Selanjutnya, determinan domestik merujuk pada situasi dan kondisi di dalam negeri yang terbagi berdasarkan perubahan waktu, yaitu:

1. *Highly stable determinants*; merupakan kondisi dalam negeri yang mencakup luas wilayah geografi, lokasi, bentuk wilayah, iklim, jumlah populasi, serta sumber daya, khususnya sumber daya alam.
2. *Moderately stable determinants*; kondisi domestik yang berupa budaya politik, gaya politik dan kepemimpinan, serta proses politik.
3. *Unstable determinants*; merupakan sikap dan persepsi jangka panjang dan faktor-faktor ketidaksengajaan.

Dalam perspektif *highly stable determinant*, peneliti menggunakan konsep ini karena kerja sama Indo-Pasifik melibatkan wilayah laut yang menjadi penghubung antar negara yang merupakan kondisi internal atau dalam negeri. Sedangkan dalam konteks eksternal, determinan politik luar negeri mengacu pada interaksi Indonesia dengan negara-negara kawasan.

#### **D. TUJUAN PENELITIAN**

1. Menjelaskan perluasan kerja sama Indonesia di bidang maritim melalui Perjanjian Indo-Pasifik serta faktor internal dan eksternal yang menggerakkan Indonesia mengajukan perjanjian tersebut.
2. Ditujukan untuk melengkapi tugas akhir sebagai syarat kelulusan guna memperoleh

gelar sarjana strata satu (S1) di Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

## **E. METODE PENELITIAN**

### **1. Metode Pengumpulan Data**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang menekankan pada teknik *library research* atau penelitian kepustakaan. Data-data yang diperoleh adalah data valid yang didapatkan dari media cetak berupa buku, jurnal, majalah, surat kabar, dan dokumen-dokumen baik cetak maupun dari situs-situs resmi di internet serta sumber-sumber lainnya yang terkait dengan dengan objek penelitian serta dapat menunjang proses penelitian.

### **2. Metode Analisis Data**

Penelitian ini menggunakan metode analisa deduktif. Dalam metode ini peneliti akan menarik beberapa kesimpulan berdasarkan beberapa premis yang diketahui. Metode ini sering digambarkan dengan mengambil sebuah kesimpulan yang berasal dari umum menuju ke khusus (Mas'oed, 1990).

## **F. ARGUMEN**

1. Berdasarkan dengan paparan pokok permasalahan diatas, penelitian ini memiliki argumen yaitu dengan menggunakan perspektif Chris Brown tentang perubahan politik luar negeri, penelitian ini berargumen bahwa faktor internal dan eksternal

mempengaruhi perubahan politik luar negeri Indonesia dalam hal ini terkait *Indo-Pacific Treaty* yang penuh dinamika. Faktor internal antara lain; pengembalian identitas Indonesia sebagai bangsa maritim dimana Indonesia sudah terlalu lama meninggalkan laut sebagai basis kesehariannya serta memperkuat ekonomi Indonesia melalui diplomasi maritim. Adapun faktor eksternal antara lain; menjaga keamanan dan stabilitas kawasan selaku penggagas perjanjian Indo-Pasifik dengan melakukan kerja sama dengan negara kawasan, serta meredam konflik dengan metode pencegahan tanpa senjata yang berpotensi mengancam keamanan kawasan.

2. Dengan menggunakan perspektif determinan politik luar negeri *highly stable determinant* menurut Howard Lentner, penelitian ini memiliki argumen bahwa melalui *Indo-Pacific Treaty* menjadi sarana perluasan kerja sama geopolitik Indonesia yang dilatar belakangi kondisi geografis dalam hal ini kawasan strategis laut, bentuk wilayah dan iklim serta sumber daya dalam rangka mewujudkan gagasan Poros Maritim Dunia.

## **G. JANGKAUAN PENELITIAN**

Jangkauan penulisan dalam sebuah penelitian sangat diperlukan guna menghindari terjadinya penyimpangan pembahasan, dan juga untuk membantu fokus pada pokok permasalahan yang telah ditentukan agar objek penelitian lebih jelas dan spesifik, sehingga permasalahan dan kajian tidak keluar dari wacana yang telah ditetapkan.



Dalam penelitian ini, peneliti akan membatasi topik pada perluasan kerja sama Indonesia di bidang maritim, kemudian terdapat juga topik bahasan mengenai faktor internal dan eksternal Indonesia menggagas Perjanjian Indo-Pasifik.

## **H. SISTEMATIKA PENULISAN**

### **BAB I: Pendahuluan**

Bab ini membahas latar belakang, rumusan masalah, kerangka pemikiran, tujuan penelitian, metode penelitian, argumen utama, jangkauan penelitian, dan sistematika penulisan.

### **BAB II:**

Membahas tentang urgensi dan maksud *Indo-Pasific Treaty* terhadap perluasan kerja sama antar negara kawasan.

### **BAB III:**

Membahas tentang perubahan politik luar negeri terkait perluasan kerja sama Indonesia di bidang maritim melalui *Indo-Pacific Treaty*

### **BAB IV:**

Membahas determinan politik luar negeri terkait perluasan kerja sama Indonesia di bidang maritim melalui *Indo-Pacific Treaty*

### **BAB V: Penutup**

Bab ini membahas kesimpulan dari penjelasan yang sudah dipaparkan di bab-bab sebelumnya.

